

KORUPSI

ANCAMAN NYATA

KEBANGKRUTAN MORAL BANGSA



Dr. Carlos Maia

KORUPSI:

ANCAMAN NYATA KEBANGKRUTAN MORAL BANGSA

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si.



Korupsi : Ancaman Nyata Kebangkrutan Moral Bangsa

Penulis:

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si.

Editor: Indana Zuhrotun Ni'mah, M.Pd

Desain Cover: Akbar Hidayat

Layouter: Lailatul Nur Ula

ISBN: 978-623-8067-96-1

Cetakan Pertama: Juli, 2026

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: vi + 155 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit Indonesia Imaji

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

(Grup CV. Indonesia Imaji)

Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6,

Mojosongo, Jebres, Surakarta (57127)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

Website: www.indonesiaimaji.com

Kata Pengantar

Buku ini lahir dari kegelisahan yang kian nyata: di tengah kemajuan ilmu dan teknologi, kisah tentang amplop, akses, dan “aturan yang bisa diatur” justru terasa akrab. Persoalan ini bukan sekadar hitung-hitungan kerugian rupiah, melainkan luka pada nurani bersama retaknya rasa malu, meredupnya teladan, dan jauhnya jarak antara sumpah jabatan dan kenyataan hidup orang kebanyakan. Di sinilah pijakan buku ini: mengajak melihat korupsi bukan semata pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan atas amanah yang perlahan meluluhkan sendi-sendi kemanusiaan.

Pendekatan yang digunakan sengaja dibuat membumi. Bab-bab awal diawali dengan vinyet kisah singkat tentang orang biasa di persimpangan sulit: seorang pegawai yang digoda “ucapan terima kasih”, orang tua yang “membeli antrean” demi obat anak, mahasiswa yang belajar bahwa mencontek bisa “dimaklumi”. Kisah-kisah ini tidak untuk menghakimi, melainkan mengingatkan bahwa setiap godaan kecil adalah anak tangga pertama menuju kebiasaan buruk lereng licin tempat manusia baik pun bisa terpeleset bila sistem turut mendorong. Di antara cerita, pembaca diajak menengok empat poros nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan kepedulian sebagai kompas moral yang sederhana namun tegas: apakah keputusan yang diambil mendekatkan atau menjauhkan diri dari nilai-nilai itu?

Buku ini menempatkan korupsi sebagai “ekosistem”: ia tumbuh ketika institusi longgar, ekonomi politik berbiaya mahal,

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Bagian 1 — Korupsi sebagai Kebangkrutan Moral Bangsa	1
A. Akar Sejarah dan Makna Moral Korupsi	2
B. Anatomi Dampak (Individu Keluarga Komunitas Bangsa)	6
C. Empat Nilai yang Menjadi Pijakan	10
D. Dari Mana Kisah dan Angka dalam Buku Ini	14
Bagian 2 — Ekosistem Korupsi Kontemporer: Struktur Dosa Publik	20
A. Tipologi Praktik & Normalisasi	20
B. Aktor, Insentif, & Titik Rawan	23
C. Modus & Red Flags	26
D. Mengukur Kerusakan Moral	29
Bagian 3 — Demokrasi, Pemilu, & Uang: Erosi Legitimasi Moral	33
A. Siklus Uang Politik	33
B. Teknologi Manipulasi	36
C. Integritas Pendanaan & Perwakilan	39
D. Legitimasi & Kepercayaan	41
Bagian 4 — Layanan Publik: Luka Etik di Ruang yang Seharusnya Adil	45
A. Kesehatan	45
B. Pendidikan	48
C. Peradilan	51

D. Desain Layanan Bermartabat.....	54
Bagian 5 — Pengadaan & Infrastruktur: Integritas sebagai Nilai Publik	57
A. Siklus Pengadaan & Titik Rawan	57
B. Analitik Risiko	60
C. Transparansi Kontrak.....	62
D. Pendidikan Moral Publik	64
Bagian 6 — SDA & Iklim: Dosa terhadap Rumah Bersama	66
A. Perizinan & Tata Ruang Moral	66
B. Rantai Pasok & Greenwashing.....	69
C. Keadilan Antargenerasi	71
D. Penegakan & Pemulihan	73
Bagian 7 — Jejak Uang Gelap: Anonimitas sebagai Strategi Amoral	77
A. BO & Tanggung Jawab Publik.....	78
B. <i>Trade-Based Money Laundering</i>	81
C. Gatekeepers & Etika Profesi.....	85
D. Integrasi Data & Akuntabilitas	88
Bagian 8 — Korupsi Digital: Etika di Era Otomasi	92
A. Lanskap Risiko Digital	92
B. Perlindungan & Kepatuhan Bermartabat.....	96
C. AI: Pedang Bermata Dua	99
D. Desain yang Menolak Godaan	102
Bagian 9 — Budaya, Agama, & Etika Profesi: Mengubah Bahasa, Mengubah Hati	105
A. Membongkar Eufemisme.....	105
B. Mimbar & Kode Etik.....	109

C. Kampanye Pop & Komunitas	112
Bagian 10 — Masyarakat Sipil, Media, & Civic Tech: Merawat Malu Kolektif	115
A. Kanal Aduan yang Manusiawi: Membangun Kepercayaan Melalui Desain.....	116
B. Jurnalisme Investigasi Bermartabat: Pengawas Kekuasaan di Era Digital	121
C. <i>Civic Tech</i> & Pengawasan Partisipatif: Teknologi di Tangan Warga	125
Bagian 11 — Arsitektur Kebijakan & Kelembagaan: Menegakkan Martabat Hukum	130
A. Peta Aktor Pemberantasan Korupsi dan Orkestrasi Mandat	131
B. Instrumen Transparansi dan Keterbukaan sebagai Disinfektan Sistemik.....	134
C. Penguatan Hukum Substantif dan Etika Publik	140
D. Rancang Bangun Insentif dan Disinsentif Moral	143
Penutup	148
Daftar Pustaka	150
Profil Penulis	153

Bagian 1 — Korupsi sebagai Kebangkrutan Moral Bangsa

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” — Lord Acton

Vinyet Pembuka

Baskoro menatap tumpukan dokumen di mejanya. Di antara proposal teknis dan laporan kemajuan, terselip sebuah amplop cokelat tebal, tanpa nama, tanpa alamat pengirim. Ia tahu persis isinya. Ini adalah "ucapan terima kasih" di muka dari kontraktor yang sangat ingin memenangkan proyek jembatan desa. Proyek itu sendiri vital, menghubungkan dua dusun yang terisolasi. Namun, spesifikasi yang diajukan kontraktor ini sedikit di bawah standar, meski masih bisa "diatur" dalam laporan. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak keluarganya; biaya sekolah anak sulungnya yang baru masuk universitas dan cicilan rumah yang belum lunas. Uang ini akan menyelesaikan semuanya. Rekan-rekannya di kantor selalu berkata, "Ini bukan mencuri, ini rezeki. Semua juga begitu." Rasionalisasi itu terdengar begitu menggoda. Namun, di sisi lain, ia teringat wajah ayahnya, seorang guru desa yang selalu mengajarkan bahwa kehormatan adalah satu-satunya harta yang tak bisa dibeli. Mengambil amplop ini terasa seperti langkah pertama

Bagian 2 — Ekosistem Korupsi

Kontemporer: Struktur Dosa Publik

“Every system is perfectly designed to get the results it gets.”

— W. Edwards Deming

A. Tipologi Praktik & Normalisasi

Pungli, gratifikasi “adat”, konflik kepentingan

Ekosistem korupsi dibangun di atas fondasi praktik-praktik yang telah dinormalisasi hingga seringkali tidak lagi dianggap sebagai kejahatan serius. Di tingkat paling bawah, terdapat *petty corruption* atau korupsi receh, yang manifestasi paling umumnya adalah pungutan liar (pungli). Praktik ini merajalela di titik-titik layanan publik, di mana birokrat tingkat rendah menyalahgunakan kewenangan mereka untuk memeras warga yang membutuhkan layanan cepat atau pasti. Meskipun nilainya kecil per transaksi, dampak akumulatifnya sangat besar dalam menggerus kepercayaan publik dan menciptakan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat.

Selangkah di atas pungli adalah gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yang seringkali dibungkus dengan dalih budaya atau “adat istiadat”. Pemberian hadiah kepada pejabat setelah sebuah layanan selesai seringkali dirasionalisasi sebagai “tanda terima kasih” atau bagian dari

Bagian 3 — Demokrasi, Pemilu, & Uang: Erosi Legitimasi Moral

"The price of liberty is eternal vigilance."

— John Philpot Curran

A. Siklus Uang Politik

Fundraising belanja kampanye payback kebijakan

Proses demokrasi elektoral di Indonesia terperangkap dalam sebuah siklus yang merusak, didorong oleh biaya politik yang teramat tinggi. Untuk maju dalam kontestasi sebagai bupati, walikota, gubernur, atau anggota legislatif, seorang kandidat harus mengeluarkan dana yang fantastis, seringkali mencapai puluhan hingga ratusan miliar Rupiah. Biaya ini tidak hanya mencakup belanja kampanye yang wajar seperti iklan dan alat peraga, tetapi juga komponen-komponen ilegal atau semi-legal seperti "mahar politik" yang harus disetorkan kepada partai politik sebagai "tiket" pencalonan, serta praktik politik uang masif seperti "serangan fajar" untuk membeli suara pemilih.

Karena besarnya biaya ini, sangat sedikit kandidat yang mampu mendanai kampanye mereka sendiri. Akibatnya, mereka menjadi sangat bergantung pada donatur-donatur besar, yang seringkali merupakan para oligark atau korporasi dengan kepentingan bisnis yang signifikan. Dukungan

Bagian 4 — Layanan Publik: Luka Etik di Ruang yang Seharusnya Adil

“A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones.” — Nelson Mandela

Bab ini bertujuan untuk mendemonstrasikan secara analitis bagaimana korupsi dalam layanan publik dasar kesehatan, pendidikan, dan peradilan bukan sekadar penyimpangan administratif, melainkan sebuah agresi etis yang secara disproportional melukai kelompok masyarakat paling rentan. Korupsi di sektor ini menggerus fondasi kontrak sosial dan mengubah ruang yang seharusnya menjadi manifestasi keadilan menjadi arena transaksional yang kejam. Ketika hak-hak fundamental warga negara dikomodifikasi, negara pada hakikatnya telah mengkhianati mandat utamanya dan membiarkan kebangkrutan moral merajalela di lini terdepan interaksi antara pemerintah dan rakyatnya.

A. Kesehatan

Sektor kesehatan adalah arena di mana taruhannya adalah nyawa itu sendiri. Korupsi di ranah ini, oleh karena itu, bukan hanya mencuri uang, melainkan mencuri harapan dan kesempatan hidup. Praktik koruptif, dari yang berskala kecil

Bagian 5 — Pengadaan & Infrastruktur: Integritas sebagai Nilai Publik

“Sunlight is said to be the best of disinfectants.”

— Louis D. Brandeis

Bab ini bertujuan untuk mentransformasikan persepsi publik tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ) dari sekadar proses teknis-administratif menjadi sebuah panggung utama di mana integritas dan moralitas publik diuji dan dipertontonkan. Kualitas sebuah jembatan yang menghubungkan dua desa, kokohnya dinding sekolah tempat anak-anak belajar, dan mulusnya jalan yang menopang perekonomian rakyat adalah cerminan fisik dari kualitas nurani para pengambil keputusan. Korupsi dalam pengadaan bukan hanya mencuri anggaran; ia mencuri keselamatan, masa depan, dan kepercayaan publik.

A. Siklus Pengadaan & Titik Rawan

Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konsisten menjadi salah satu area paling rentan korupsi. Data penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa hampir 90% perkara yang ditangani terkait dengan PBJ. Kerentanan ini tersebar di seluruh siklus pengadaan, menciptakan banyak celah bagi praktik ilegal.

Bagian 6 — SDA & Iklim: Dosa terhadap Rumah Bersama

“It’s the little things citizens do. That’s what will make the difference.” — Wangari Maathai

Bab ini bertujuan untuk mengangkat isu korupsi sumber daya alam (SDA) dari ranah ekonomi-politik ke ranah etika dan spiritual. Eksploitasi alam yang didasari oleh keserakahan dan difasilitasi oleh korupsi bukanlah sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebuah pelanggaran terhadap amanah antargenerasi dan sebuah "dosa ekologis" terhadap ciptaan sebagai rumah bersama. Ketika hutan dibabat, sungai dicemari, dan tanah dirusak demi keuntungan segelintir orang, yang dikhianati bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga kontrak ekologis yang menopang kehidupan itu sendiri.

A. Perizinan & Tata Ruang Moral

Fondasi dari pengelolaan SDA yang berkelanjutan adalah sistem perizinan dan tata ruang yang berintegritas. Namun, di Indonesia, area ini justru menjadi salah satu titik paling rawan korupsi, di mana logika ekologis dan keadilan sosial seringkali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Bagian 7 — Jejak Uang Gelap: Anonimitas sebagai Strategi Amoral

“*Technology is neither good nor bad; nor is it neutral.*”
— Melvin Kranzberg

Dalam ekosistem korupsi modern, anonimitas adalah mata uang utama. Kemampuan untuk menyamarkan identitas, mengaburkan jejak kepemilikan, dan memutus rantai transaksi merupakan fondasi yang menopang struktur kejahatan keuangan paling canggih. Bab ini bertujuan untuk menyingkap selubung kegelapan tersebut, dengan membedah instrumen-instrumen anonimitas yang digunakan oleh para koruptor mulai dari perusahaan cangkang hingga skema pencucian uang berbasis perdagangan. Dengan memahami bagaimana para pelaku bersembunyi di balik kerumitan hukum dan finansial, kita dapat mulai merumuskan strategi untuk memulihkan prinsip fundamental yang hilang: tanggung jawab. Tujuan akhirnya adalah merobek topeng para pemilik manfaat sesungguhnya (*beneficial owners*) dan menyeret mereka ke dalam terang akuntabilitas publik.

Bagian 8 — Korupsi Digital: Etika di Era Otomasi

“Tidak penting apa agama atau sukumu; kalau kamu bisa melakukan kebaikan, orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu.” — Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah lanskap korupsi secara fundamental. Di satu sisi, teknologi menciptakan metode-metode baru yang lebih canggih untuk melakukan kejahatan keuangan, menyembunyikan jejak, dan menyerang sistem pengawasan. Di sisi lain, teknologi yang sama, terutama kecerdasan buatan (AI), menawarkan perangkat yang belum pernah ada sebelumnya untuk mendeteksi, mencegah, dan memberantas korupsi. Bab ini akan menjelajahi dualitas teknologi sebagai pedang bermata dua. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kita dapat menjinakkan kekuatan teknologi, merancang sistem yang secara inheren menolak godaan, dan memastikan bahwa era otomasi justru memperkuat, bukan merusak, nurani dan integritas publik.

A. Lanskap Risiko Digital

Dunia maya telah menjadi arena baru bagi para pelaku kejahatan keuangan. Kecepatan, anonimitas semu, dan sifat lintas batas dari transaksi digital menciptakan lingkungan

Bagian 9 — Budaya, Agama, & Etika

Profesi: Mengubah Bahasa, Mengubah Hati

If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.” — Desmond Tutu

Pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil jika hanya mengandalkan penegakan hukum dan inovasi teknologi. Akar dari korupsi tertanam dalam budaya, bahasa, dan etika atau ketiadaannya. Pertarungan yang paling fundamental adalah pertarungan di dalam benak dan hati setiap individu. Bab ini berargumen bahwa untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan, kita harus secara sadar menggeser narasi publik tentang korupsi, memperkuat komitmen moral dari mimbar-mimbar keagamaan, dan mengikat para profesional pada kode etik yang hidup, bukan sekadar dokumen yang mati. Ini adalah upaya untuk mengubah bahasa yang kita gunakan, dengan harapan dapat turut mengubah hati.

A. Membongkar Eufemisme

Bahasa bukanlah cermin realitas yang pasif; ia secara aktif membentuk cara kita memahami dan merasakan realitas. Dalam ekosistem korupsi, bahasa seringkali

Bagian 10 — Masyarakat Sipil, Media, & Civic Tech: Merawat Malu Kolektif

"If men were angels, no government would be necessary."

— James Madison

Pendahuluan: Menggeser Paradigma dari “Bongkar Aib” menjadi “Perbaiki Sistem”

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah memasuki sebuah era baru, di mana sandaran utama tidak lagi dapat diletakkan semata-mata pada pundak lembaga negara. Ketika institusi formal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi berbagai tekanan yang menguji independensinya, kekuatan sejati dalam perang melawan korupsi justru bergeser ke ranah publik. Gerakan masyarakat sipil kini menjadi kunci penentu, sebuah garda terdepan yang menuntut akuntabilitas dan mendorong perubahan. Bab ini akan mengelaborasi evolusi krusial dalam peran publik: sebuah pergeseran paradigma dari sekadar menjadi penonton yang reaktif dan marah atas skandal korupsi yang terungkap sebuah mentalitas "bongkar aib" menuju partisipan aktif yang tidak hanya mengungkap masalah, tetapi juga secara gigih menuntut dan mengawal perbaikan sistemik.

Bagian 11 — Arsitektur Kebijakan & Kelembagaan: Menegakkan Martabat Hukum

“If corruption is a disease, transparency is a central part of its treatment.” — Kofi Annan

Memastikan Hukum “Terlihat Adil” dan Mendidik Nurani Publik

Efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada ketajaman penindakan, tetapi juga pada kokohnya arsitektur kebijakan dan kelembagaan yang menjadi tulang punggungnya. Bab ini akan membedah infrastruktur hukum dan institusional di Indonesia, dengan tujuan menunjukkan bahwa penegakan hukum yang bermartabat melampaui sekadar penghukuman pelaku. Ia harus dirancang sebagai sebuah sistem yang transparan, akuntabel, dan mampu menanamkan kepercayaan publik yang mendalam.

Konsep sentral yang akan menjadi pemandu dalam bab ini adalah adagium hukum fundamental: *justice must not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done*. Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat secara nyata dan tidak meragukan lagi telah ditegakkan. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa persepsi

Penutup

Pada akhirnya, perjuangan melawan korupsi bukan semata perkara menghukum pelaku, melainkan memulihkan yang rapuh: kepercayaan publik, martabat pelayanan, dan rasa keadilan yang bisa dirasakan semua orang. Seluruh uraian dalam buku ini dari vinyet keseharian, peta ekosistem korupsi, hingga ikhtiar teknis dan kebijakan ditawarkan sebagai undangan untuk bergerak bersama, seturut peran masing-masing. Integritas perlu ditumbuhkan sebagai kebiasaan, bukan sekadar slogan; disematkan dalam desain sistem, bukan hanya pidato; dibuktikan dalam keputusan kecil sehari-hari, bukan menunggu momentum besar yang jarang datang.

Harapan utama dari karya ini sederhana: setiap pembaca menemukan satu tindakan yang dapat dilakukan segera menolak gratifikasi yang “dianggap lumrah”, mengawal transparansi di lingkungan kerja, memperbaiki prosedur yang membuka celah, atau mengajarkan keberanian jujur kepada generasi muda. Bila tindakan kecil itu dirawat dan diperbanyak, ruang bagi kecurangan akan menyempit, dan nalar publik akan kembali berpihak pada yang benar.

Perjalanan tentu tidak selesai di sini. Setiap bab sesungguhnya adalah awal bagi dialog baru: antara warga dan negara, antara aturan dan praktik, antara teknologi dan etika. Semoga gagasan, data, dan alat yang disajikan menjadi bekal untuk melanjutkan dialog tersebut lebih jernih, lebih berani, dan lebih bertanggung jawab.

Terima kasih kepada semua pihak yang terus menyalakan lilin di tengah gelap: para pendidik, tenaga kesehatan, pegawai publik, jurnalis, penegak hukum, peneliti, pegiat masyarakat sipil, dan

Daftar Pustaka

- Arifin, F., & Djajaputera, G. (2024). Politik dinasti dan pembaruan sistem demokrasi di Indonesia. *IUSTUM: Jurnal Hukum*, 31(3), 636–665.
- Budi Setiawan. (2023). Optimalisasi laporan dana kampanye untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan serentak tahun 2024. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9), 3017–3027.
- Daeni, F. I. M., Rachmarani, F. A., & Utama, I. R. (2023, 28 Oktober). Pengaruh buzzer politik dalam pemilu: Tantangan terhadap *electoral justice* dalam mempertahankan prinsip demokrasi. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 183–200.
- Darwis, R., Mubarakah, M. A., & Ramdani, F. A. (2024). Biaya politik tinggi: Oligarki, dinasti politik, dan konsekuensinya terhadap demokrasi Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(1), 81–100.
- Daurrohmah, N., Syamsuddin, M., & Rahayu, S. (2021). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat sipil. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 217–232.
- Dj. Sari, Y. (2019). Tindakan preventif pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam. *Menara Ilmu*, 13(2), 1–12.
- Dwi Putra, N. D., Sania, S., & Mitrin, A. (2024). Pengaruh *deepfake* terhadap kredibilitas media tradisional: Tantangan dan implikasi di era digital. *Sagara Komunika*, 1(1), 13–18.

- Effendi, W. R. (2017). Dinasti politik dalam pemerintahan lokal: Studi kasus dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233–247.
- Emirzal, A., Gultom, A. M., Adrison, V., & Brata, A. (2023). The correlation between state capture, grand corruption, petty corruption, and investment in Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 157–170.
- Fazzan. (2015). Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 146–165.
- Hafiluddin, M. Z., Hs, A. Z., Pattiauw, N. N., & Sanaky, H. A. (2022). Dinamika biaya politik yang tinggi dalam politik dan dampaknya terhadap korupsi yang berkelanjutan. *PAMALI (Pattimura Magister Law Review)*, 6(2), 63–79.
- Hidayat, R., & Putra, D. A. (2023). Resistensi pemilih mahasiswa terhadap politik uang. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 31–40.
- Jayusman, D., & Fathi, M. (2023). Questioning the practice of state capture corruption in the revision of the 2020 Mining Law. *LEGAL BRIEF*, 12(2), 187–196.
- Marwan, F., & Aulia, R. (2023). Audit forensik sebagai upaya pemberantasan korupsi partai politik. *Journal of Delicti*, 2(1), 29–40.
- Nasoha, A. M. M., Putri, C. Z. A., Listiana, S., & Hasna, D. A. (2024). Analisis tindak pidana korupsi di Indonesia perspektif fikih perbandingan mazhab dan hukum positif. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(7), 241–253.
- Nasution, N., & Putri, R. (2021). Akuntansi forensik dan fenomena korupsi politik. *Jurnal Sistem dan Proses Gedung*, 3(2), 73–82.

Profil Penulis



Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si., lahir di Dili pada 4 November 1974, sebagai putra dari Manuel Maia (+) dan Fernanda Maia (+). Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan pengabdian. Ia menikah dengan Romana Christiana Boy dan dikaruniai dua orang anak, Dirgatama Manuel Maia dan Maria Fernanda Maia, yang menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan hidup dan pengabdianya.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 9 Dili dan diselesaikan pada tahun 1988. Ia melanjutkan ke SMP Katolik Paulus VI Dili hingga lulus pada tahun 1991, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Dili pada tahun 1994. Sejak masa sekolah, bakat kepemimpinan dan ketekunannya telah tampak melalui berbagai aktivitas organisasi dan kepemudaan yang diikutinya.

Minatnya pada bidang sosial membawanya melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, Jurusan Ilmu Pekerjaan Sosial, dan meraih gelar Ahli Kesejahteraan Sosial (AKS) pada tahun 1998. Ia kemudian memperdalam kajian sosiologi dengan menempuh Program Magister Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang dan memperoleh gelar Magister Sains

(M.Si.) pada tahun 2004. Puncak capaian akademiknya diraih pada tahun 2020 dengan gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Ilmu Administrasi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Latar belakang akademik ini membentuk fondasi kuat bagi pemikirannya dalam bidang administrasi publik, kebijakan, dan pembangunan sosial.

Sejak usia muda, Dr. Carlos aktif dalam berbagai organisasi. Ia terlibat dalam Gerakan Pramuka dari jenjang Siaga hingga Penegak Saka Dirgantara di Dili (1984–1999). Kepemimpinannya terasah ketika menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Katolik Paulus VI (1989–1991) serta menjadi anggota dan pengurus OSIS SMA Negeri 2 Dili (1992–1993). Ia juga aktif dalam dunia bela diri melalui Perguruan Pencak Silat Padjadjaran (1991–1994) dan kemudian Tarung Derajat sejak 1994 hingga kini. Pengalaman ini memperkaya karakter kepemimpinan, ketegasan, serta daya juangnya.

Berbagai capaian penting turut mewarnai perjalanan organisasinya. Pada tahun 1991, ia menjadi peserta Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta, sebagai Pratama Kontingen Timor Timur. Tahun 1993, ia terpilih sebagai Paskibraka Nasional dan dipercaya menjabat Lurah Putera Desa Bahagia serta Komandan Kelompok 17 Pagi di Istana Negara, Jakarta. Dalam bidang olahraga bela diri, ia pernah menjadi pelatih Tarung Derajat untuk Kontingen Timor Leste pada SEA Games XXVI tahun 2011 di Jakarta–Palembang, serta pelatih Kontingen Nusa Tenggara Timur pada Kejuaraan Nasional Piala Presiden IV tahun 2013 di Bandung. Keseluruhan pengalaman ini mencerminkan integritas, dedikasi, dan konsistensi dalam pengabdian.

Dalam ranah profesional, Dr. Carlos mengabdikan diri sebagai dosen tidak tetap sejak tahun 1999 di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kupang dan Malang. Selain itu, sejak tahun 2007 ia juga menekuni dunia kewirausahaan, khususnya di sektor

pariwisata dan perdagangan, sebagai wujud kemandirian dan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi.

Sebagai akademisi produktif, ia telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang membahas pendidikan, administrasi publik, kebijakan, demokrasi, pembangunan daerah, hingga tata kelola pemerintahan dan korporasi di era digital. Karya-karyanya merefleksikan konsistensi pemikiran yang kritis dan konstruktif terhadap dinamika perubahan sosial-politik kontemporer. Melalui buku-bukunya, ia mendorong inovasi pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat marjinal, serta pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Perjalanan akademik, pengalaman organisasi, serta kiprah profesional yang luas menjadikan Dr. Carlos Manuel Maia sebagai figur akademisi-praktisi yang utuh. Ia tidak hanya bergiat dalam ranah konseptual, tetapi juga terlibat langsung dalam implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Dedikasinya terhadap pendidikan, administrasi publik, dan kesejahteraan sosial menghadirkan teladan tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat bersinergi dengan tindakan nyata demi kemajuan masyarakat.

KORUPSI

ANCAMAN NYATA

KEBANGKRUTAN MORAL BANGSA

Buku Korupsi Ancaman Nyata Kebangkrutan Moral Bangsa membahas korupsi sebagai pengkhianatan amanah yang merusak kejujuran, keadilan, rasa malu, dan kepedulian sosial. Melalui kisah-kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, pembaca diajak memahami bahwa korupsi sering bermula dari kompromi kecil yang lama-kelamaan menjadi kebiasaan merusak.

Dengan pembahasan yang membumi, buku ini mengurai bagaimana korupsi tumbuh dalam layanan publik, politik, pengadaan, teknologi, budaya, hingga kelembagaan. Karya ini penting dibaca oleh siapa pun yang ingin memahami bahaya korupsi sekaligus menemukan harapan bahwa integritas masih bisa diperjuangkan.